

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pendidikan menjadi bagian yang mendapat sorotan besar dalam pembangunan bangsa, hal tersebut disebabkan karena pendidikan berperan dalam pembentukan insan atau masyarakat yang kuat dari segi ilmu pengetahuan, sikap ataupun kepribadian. Pendidikan mampu berperan dalam penguatan kualitas manusia yang ada pada suatu Negara. Sayangnya, hal tersebut berbanding terbalik dengan kondisi yang ada, bahwasanya pendidikan yang ada di Indonesia belum bisa tercermin dengan baik, hal tersebut dapat terlihat dari penurunan peringkat IPM (index pembangunan manusia) yang dirilis UNDP, Indonesia berada pada peringkat 108 pada tahun 2010 dan 111 pada tahun 2011 dari 169 negara hal tersebut menunjukkan bahwa masih belum berkembangnya mutu pendidikan secara nasional, karena salah satu indikator dalam penentuan IPM adalah pendidikan.

Terlepas dari persoalan tersebut, pemerintah selaku penyelenggara pendidikan tidak tinggal diam. Berbagai terobosan dikeluarkan guna menciptakan pendidikan yang bermutu untuk masyarakat. Upaya-upaya tersebut diantaranya dengan memberikan bentuk pelatihan dan pengembangan kepada guru guna peningkatan kompetensinya dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Selain itu ada pula dalam bentuk peningkatan lainya seperti pengadaan sarana dan prasarana sekolah yang

bemutu yang juga menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap peningkatan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Sayangnya berbagai terobosan dalam pencapaian mutu yang digulirkan pemerintah tersebut belum mencerminkan hasil yang signifikan. Untuk beberapa sekolah mungkin terjadi peningkatan, namun jika ditinjau secara nasional kurang begitu terlihat. Hal tersebut menandakan bahwasanya terobosan yang dilakukan oleh pemerintah baru sebatas implikasi secara fisik atau secara terlihat, Namun jika ditinjau secara kasat mata, masih terdapat hal-hal yang kurang terpantau efektif seperti halnya mekanisme yang bekerja atau sistem yang menjalankannya.

Mekanisme yang dimaksud adalah sistem koordinasi yang masih secara birokratik-sentralistik, dimana proses pembuatan keputusan dan seluruh pengembangan mengenai pendidikan masih diserahkan pada pemerintah pusat, sehingga mengakibatkan ketergantungan pihak sekolah pada keputusan-keputusan birokratik dari pemerintah. Keputusan dan bentuk pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terkadang kurang sesuai dengan kondisi dan keadaan yang ada pada satuan persekolahan, sehingga menyebabkan sekolah kehilangan kemandirian, motifasi, inisiatif dan kreatifitas untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu disekolahnya. Maka dari itu, munculah suatu paradigma baru dalam dunia pendidikan dalam bentuk kebijakan desentralisasi yang tertuang dalam kebijakan MBS atau Manajemen Berbasis Sekolah. Kebijakan tersebut tercantum dalam Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 51 yang menyatakan, “Pengadaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,

dan pendidikan menengah didasarkan pada standar pelayanan minimum dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah”.

MBS merupakan bentuk kebijakan pendidikan yang memandang sekolah secara individual. Artinya pemerintah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada sekolah dalam pengelolaan bidang manajemen sekolah. MBS merupakan bentukan realisasi dari kebijakan otonomi daerah yang sebelumnya dikeluarkan pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Dengan adanya MBS sekolah dapat leluasa mengelola sumberdaya yang ada dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan pada satuan persekolahan. Selain itu otonomi yang diberikan berfungsi sebagai bentuk dorongan agar terciptanya suatu pengambilan keputusan secara partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut Nanang Fatah (2004:4) dalam bukunya Manajemen Berbasis Sekolah menjelaskan bahwa :

Manajemen berbasis sekolah sebagai terjemahan dari *School Based Manajemen* adalah suatu pendekatan politik yang bertujuan memberikan kekuasaan dan meningkatkan partisipasi sekolah dalam upaya perbaikan kinerjanya yang mencakup guru, siswa, orangtua, dan masyarakat. MBS memodifikasi struktur pemerintah dengan memindahkan otoritas dalam pengambilan keputusan ke setiap yang berkepentingan ditingkat lokal.

Dari definisi yang diungkapkan diatas dapat terlihat bahwasanya bentuk implementasi dari MBS memiliki misi yang salah satunya adalah untuk peningkatan partisipasi masyarakat luas, baik orang tua siswa atau masyarakat

lainya yang memiliki kepentingan baik secara langsung ataupun tidak. Misi tersebut merupakan ide utama dari bentuk kebijakan otonomi daerah dalam MBS, yaitu agar tumbuhnya partisipasi masyarakat secara aktif untuk membangun dirinya sendiri. Sedangkan pemerintah berperan untuk memfasilitasi dan menjadi mitra kerja masyarakat. Masyarakat berperan penting dalam keberhasilan pendidikan seperti tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 pasal 8 yang menyebutkan bahwa “Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.” serta pada pasal 9 yang menyebutkan “Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumberdaya dalam penyelenggaraan pendidikan”.

Selain itu Ace Suryadi (2003) mengungkapkan pentingnya masyarakat dalam pengelolaan pendidikan yang dapat terlihat dari berbagai sisi, diantaranya :

1. Masyarakat adalah *Stackholder* pendidikan,
2. Masyarakat sebagai pihak yang menyediakan *raw input* (siswa), menjadi bagian dalam keberhasilan proses pendidikan, dan pihak yang akan menerima lulusan pendidikan,
3. Masyarakat sebagai pihak yang ikut membiayai pendidikan, baik melalui pajak ataupun secara langsung melalui biaya pendidikan putra/putrinya.

Mengingat pentingnya partisipasi seluruh warga sekolah dan masyarakat sekitar untuk memajukan pendidikan baik dalam bentuk aspirasi, harapan ataupun kebutuhan, maka diperlukan suatu sarana aspirasi dalam bentuk organisasi atau lembaga yang fungsinya adalah untuk menampung dan menyalurkan berbagai ide, aspirasi, dan harapan yang muncul dari masyarakat atau warga sekitar untuk peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan.

**Muhamad Sanjaya, 2012**

Studi Komparasi Kinerja Komite Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri Wilayah Kota Dan Desa (Studi Pada SDN Se-kecamatan Coblong Kota Bandung dan SDN Se-kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu

Dalam MBS sarana yang dimaksud adalah organisasi komite sekolah, dimana komite sekolah memiliki peran yang amat penting, terutama dalam pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam upayanya untuk peningkatan kualitas pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Secara yuridis keberadaan komite sekolah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjelaskan bahwa “Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan.” Berdasarkan pengertian tersebut terlihat bahwasanya sebagai lembaga mandiri yang mewakili aspirasi masyarakat, komite sekolah terdiri atas unsur orang tua siswa, wakil tokoh masyarakat (bisa ulama/rohaniwan, budayawan, pemuka adat, pakar atau pemerhati pendidikan, wakil organisasi masyarakat, wakil dunia usaha dan industri, bahkan jika perlu perwakilan dari siswa, wakil guru-guru, dan kepala sekolah).

Komite sekolah mempunyai tugas dan wewenang yang telah diatur dalam Kepmendiknas No. 044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah, dimana tugas utama komite sekolah ialah membantu penyelenggaraan pendidikan di sekolah dalam kapasitasnya sebagai pemberi pertimbangan, pendukung program, pengontrol, dan sebagai mediator. Untuk memajukan pendidikan di sekolah, komite sekolahpun membantu pihak sekolah dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar, manajemen sekolah, kelembagaan sekolah, sarana dan prasarana sekolah, pembiayaan pendidikan, dan

mengkoordinasikan peran serta seluruh lapisan masyarakat. Pada dasarnya peran serta komite dalam pembangunan satuan pendidikan penting, hal ini sehubungan dengan pentingnya peran serta masyarakat dalam efektifitas kegiatan manajemen sekolah, namun pada kenyataannya belum terlaksana dengan optimal.

Sepertihalnya dalam penelitian mengenai kinerja komite sekolah pada lingkup Kecamatan Dayeuh Kolot yang dilakukan oleh Irviantri Hervininda S.Pd. dimana memberikan hasil bahwasanya kinerja komite masih tergolong rendah terutama kinerja komite sebagai badan pendukung. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh faktor budaya dan kebiasaan masyarakat sekitar atau lingkungan dimana sekolah tersebut berada. Komite merupakan organisasi mandiri yang terdiri dari orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang ada pada lingkungan dimana sekolah tersebut berada, dengan kata lain factor-faktor seperti kebudayaan dan pola hidup dari masyarakat yang ada berpengaruh terhadap kinerja para anggota komite yang bersangkutan. seperti contoh ketika ketika keorganisasian komite terbentuk pada corak kemasyarakatan yang cenderung heterogen dan individualis serta memiliki tingkat kesibukan yang tinggi, maka dengan kata lain hal-hal semacam mengadakan rapat dengan dengan orang tua siswa atau dukungan lainnya akan sulit untuk dilakukan, dan imbasnya tentu akan berpengaruh terhadap kinerja dari komite yang ada. Dengan adanya hal tersebut tentu menandakan bahwasanya kinerja komite sekolah masih belum terpantau baik.

Dalam penelitian skripsi lain yang dilakukan oleh Asep Iryanto S.Pd., didapat hasil bahwasanya untuk implementasi MBS terutama yang berada pada lingkup pedesaan terlihat bahwa kemandirian sekolah dan partisipasi masyarakat serta warga sekolah tergolong masih rendah, hal tersebut mengidentifikasi bahwa peran serta komite sekolah dalam upayanya untuk menjadikan sekolah mandiri masih kurang, hal tersebut dapat disebabkan karena kinerja komite sekolah yang belum optimal. Maka dari itu dampak yang nyata terlihat sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan dari kebijakan MBS yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam penelitian yang sama pun dijelaskan bahwa tingkat keberhasilan MBS pada lingkup desa dan kota masih terdapat perbedaan yang signifikan, dan indikator untuk partisipasi masyarakat dan warga sekolah serta kemandirian sekolah menjadi indikator yang memiliki tingkat perbedaan yang tinggi.

Kondisi kewilayahan memiliki andil penting terhadap pencapaian kinerja komite sekolah, selain persoalan mengenai jarak dan koordinasi yang menjadi penghambat, sosial dan ekonomi serta psikologi sosial masyarakatpun menjadi salah satu hal yang tidak dapat dipungkiri, misalkan saja jika sekolah dekat dengan pusat pemerintahan tentu untuk implementasi keorganisasian komite bisa berjalan sesuai dengan prosedur yang ada dan optimal hal tersebut dikarenakan koordinasi dan pengawasan yang kemungkinan akan lebih baik dari Dinas pendidikan setempat, selain itu dengan kondisi masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi tinggi, dan mayoritas pendidikan untuk masyarakat yang cenderung sudah baik akan mengakibatkan peluang untuk kerogansasian

komite yang efektif dengan keanggotaan yang secara pendidikan dan kultur sosial terpenuhi serta kemampuan sumberdaya financial yang baik maka jika secara logis tentunya akan sangat berpengaruh, selain itu dalam kondisi sarana dan prasarana yang adapun akan menunjang. Kondisi tersebut biasanya ada pada kewilayah kota, dimana dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987, pasal 1 dijelaskan bahwa “kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan administrasi yang diatur dalam perundang-undangan serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan”.

Pengertian kota sebagaimana yang diterapkan di Indonesia mencakup pengertian *town* dan *city* dalam bahasa Inggris. Selain itu, terdapat pula kapitonim kota yang merupakan satuan administrasi negara di bawah provinsi. Soerjono Soekanto (1982:149-150) menyebutkan ada beberapa cirri yang paling menonjol dari masyarakat kota, diantaranya :

- a. Kehidupan keagamaan kurang jika dibandingkan dengan kehidupan desa.
- b. Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa bergantung pada orang lain.
- c. Pembagian kerja jauh lebih tegas dan mempunyai batasan-batasan yang nyata
- d. Kemungkinan-kemungkinan memperoleh pekerjaan jauh lebih banyak diperoleh warga kota daripada warga desa, karena pembagian kerja yang tegas.
- e. Jalan pikiran yang rasional
- f. Jalan kehidupan yang cepat mengakibatkan waktu adalah segalanya.
- g. Perubahan-perubahan social tampak nyata diperkotaan.

Dengan dukungan kondisi sosial ekonomi dan konstruk kewilayahan yang baik memang sangat mendukung dalam pencapaian kinerja yang positif untuk komite sekolah, namun tidak sepenuhnya berpengaruh secara signifikan,

hal tersebut dikarenakan tipe dan pola kemasyarakatan yang ada dikota, dimana tingkat kepedulian dan bentuk sosial sistem yang ada kurang begitu mendukung untuk peran serta masyarakat dalam pengembangan mutu sekolah.

Berbeda halnya dengan kondisi sekolah yang berada pada lingkup desa, kondisi yang muncul berbanding terbalik dengan lingkup kota dimana untuk jarak pada pusat pemerintahan saja cukup jauh, seperti halnya pada wilayah Kabupaten Bandung, masih terdapat wilayah-wilayah yang jauh dari jangkauan kendaraan umum. Kondisi tersebut diperparah dengan keadaan sarana prasarana penunjang kegiatan seperti halnya internet dan sarana lainnya yang belum memadai, hal tersebut dapat mengidentifikasi bahwa kinerja komite yang berada pada lingkup desa akan tersendat oleh kondisi kewilayahan. Namun dari sisi kemasyarakatan wilayah desa mendapat dukungan positif dari sistem dan pola masyarakat yang berkembang, dimana unsur-unsur seperti gotong royong dengan sistem kekerabatan membantu menjadi salah satu factor positif yang menjadi pembeda.

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional serta berada di daerah kabupaten”. Adapun unsur-unsur desa yang dikemukakan oleh Hartono dan Arnicun (1990 : 241), diantaranya :

1. Daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak, beserta penggunaannya, termasuk juga unsure lokasi luas dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat.

**Muhamad Sanjaya, 2012**

Studi Komparasi Kinerja Komite Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri Wilayah Kota Dan Desa (Studi Pada SDN Se-kecamatan Coblong Kota Bandung dan SDN Se-kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu

2. Penduduk, adalah hal yang meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, persebaran, dan mata pencaharian penduduk desa setempat.
3. Tata kehidupan, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa. Jadi menyangkut seluk-beluk kehidupan masyarakat desa (*rural society*).

Jika membandingkan antara konsep desa dan kota yang dijabarkan diatas, tentu saja ada perbedaan yang nyata terutama dari sisi kebiasaan dan budaya masyarakat, selain itu ada perbedaan pula dari sisi geografis dan social masyarakat diwilayahnya masing-masing, dengan kata lain jika dalam konteks kinerja komite yang tidak lain adalah bentuk kontribusi masyarakat terhadap sekolah berarti ada perbedaan antara komite-komite yang berada pada wilayah pedesaan dengan perkotaan dengan asumsi yang telah dijelaskan diatas. Dengan dilatarbelakangi permasalahan diatas, peneliti merasa tertarik untuk mengetahui sejauh mana perbedaan kinerja komite sekolah pada sekolah yang berada pada lingkup desa dan kota. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan berjudul :

Studi komparasi kinerja komite sekolah di Sekolah Dasar Negeri wilayah Kota dan Desa (Studi pada SDN se-Kecamatan Coblong Kota Bandung dan SDN se-Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung).

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Penelitian ini merupakan penelitian yang ingin mengungkapkan tingkat perbedaan mengenai konsep kinerja komite yang ada dilingkup kota dan desa. Adapun bentuk rumusan masalah yang diusung adalah rumusan masalah komparatif dimana Sugiyono (2011:57) menyebutkan bahwa “rumusan

masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda”.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja komite sekolah pada SDN wilayah kota (SDN se-Kecamatan Coblong Kota Bandung) ?
2. Bagaimana kinerja komite sekolah pada SDN wilayah desa (SDN se-Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung) ?
3. Bagaimana perbedaan antara kinerja komite sekolah pada SDN diwilayah kota dan SDN di wilayah desa (Studi pada SDN se-Kecamatan Coblong Kota Bandung dan SDN se-Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung) ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

#### **1. Tujuan Umum**

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi perbedaan kinerja Komite Sekolah Dasar Negeri, di SDN wilayah Kota dan SDN wilayah Desa.

#### **2. Tujuan Khusus**

Sedangkan secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. Kinerja komite sekolah di SDN wilayah kota (studi pada SDN se-Kecamatan Coblong Kota Bandung)

- b. Kinerja komite sekolah di SDN wilayah desa (studi pada SDN se-Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung) dan,
- c. perbedaan kinerja komite sekolah di SDN wilayah kota dan SDN wilayah desa (studi pada SDN se-kecamatan Coblong Kota Bandung dan SDN se-Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung).

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Ada beberapa manfaat yang dapat penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Segi Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum mengenai perbandingan antara kinerja komite SDN yang ada pada wilayah Kota dan Desa.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya mengenai kajian disiplin ilmu khususnya mengenai komite sekolah dan Administrasi Pendidikan secara umum.

##### **2. Segi Praktis**

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja komite SDN yang ada pada lingkup kewilayahan kota yaitu pada kecamatan Coblong kota Bandung.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja komite SDN yang ada pada lingkup kewilayahan desa yaitu pada kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung.

**Muhamad Sanjaya, 2012**

Studi Komparasi Kinerja Komite Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri Wilayah Kota Dan Desa (Studi Pada SDN Se-kecamatan Coblong Kota Bandung dan SDN Se-kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perbedaan antara kinerja komite sekolah yang ada pada sekolah dasar kota yaitu SDN se-kecamatan Coblong di Kota Bandung dan SDN se-Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung yang merupakan wilayah desa.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang baik dan membangun mengenai kinerja komite sekolah baik yang ada pada SDN wilayah kota ataupun desa.
- e. Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu menambah wawasan mengenai kinerja komite sekolah SDN kota dan SDN desa bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

#### **E. ANGGAPAN DASAR**

Dalam beberapa penelitian perlu ditunjang oleh beberapa asumsi atau anggapan dasar agar penelitian tersebut memiliki landasan yang kuat dengan pokok-pokok penelitian yang jelas dan aspek-aspek yang tegas. Anggapan dasar tersebut merupakan titik tolak pemikiran dalam suatu penelitian yang kebenarannya tidak diragukan lagi oleh peneliti. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Arikunto (2002:49) bahwa :

Anggapan dasar adalah suatu hal yang diyakini kebenarannya oleh peneliti yang harus dirumuskan secara jelas untuk memperkuat permasalahan dan membantu penelitian dalam menetapkan objek penelitian di wilayah pengambilan data instrument dan pengumpulan data.

Untuk memperkuat penelitian ini maka penulis mengemukakan beberapa anggapan dasar dalam penelitian ini, yaitu ;

**Muhamad Sanjaya, 2012**

Studi Komparasi Kinerja Komite Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri Wilayah Kota Dan Desa (Studi Pada SDN Se-kecamatan Coblong Kota Bandung dan SDN Se-kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu

1. Komite sekolah berperan sebagai badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan baik pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah.
2. Komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non-politis dan non-profit, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para *stakeholder* pendidikan di tingkat sekolah sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.
3. Efektifitas kinerja komite sekolah sangat mendukung dalam keberhasilan implementasi MBS.
4. MBS yang merupakan bentuk desentralisasi pendidikan yang mensyaratkan sekolah harus memiliki kemandirian dalam pengelolaan pendidikannya, maka dari itu dibutuhkan kolaborasi yang positif antara sekolah dan masyarakat untuk mengelola pendidikan.

## F. HIPOTESIS PENELITIAN

Berdasarkan pendapat Nasution (2003:39). "Yang dimaksud dengan hipotesis adalah pernyataan tentative yang merupakan dugaan atau terkaan apa saja yang kita amati dalam usaha untuk memahaminya". Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang perlu diuji kebenarannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto (2002: 67) mengemukakan bahwa; "Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat

sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul”. Hipotesis yang menjadi jawaban sementara penulis dalam penelitian ini adalah “Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kinerja komite sekolah di SDN wilayah kota dan SDN wilayah desa”.

## **G. STRUKTUR ORGANISASI SKRIPSI**

Agar pembaca lebih mudah dalam memahami dan mengenali setiap bab yang disajikan dalam skripsi ini, berikut adalah struktur organisasi dari skripsi ini :

**BAB I** : Pendahuluan, dimana dijelaskan mengenai latarbelakang permasalahan penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan struktur keorganisasian dari pelaporan penelitian ini.

**BAB II** : Landasan Teori dan Kerangka Pikir Penelitian, dimana berisikan mengenai kajian-kajian teori yang melandasi penelitian yang akan dilakukan, baik didapat dari buku ataupun sumber-sumber lain yang mendukung.

**BAB III** : Metodologi Penelitian, dimana berisikan mengenai prosedur dan teknik-teknik dalam pengolahan data yang terkumpul dalam penelitian ini.

**BAB IV** : Isi, dimana berisikan mengenai penjelasan dari hasil penelitian baik yang disajikan dalam bentuk angka ataupun pernyataan.

BAB V : Kesimpulan dan saran, dimana berisikan hasil akhir dari penelitian dan solusi serta saran yang diberikan terhadap hasil penelitian.



**Muhamad Sanjaya, 2012**

Studi Komparasi Kinerja Komite Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri Wilayah Kota Dan Desa (Studi Pada SDN Se-kecamatan Coblong Kota Bandung dan SDN Se-kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | [Repository.upi.edu](http://Repository.upi.edu)